

# **PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

## **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019**



**Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa**

**Gowa - Sulawesi Selatan 92111**

**Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298**

**e-mail : [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id)**



# **LAPORAN KEUANGAN**

## **PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jalan Masjid Raya No. 25 Sungguminasa**

**Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298**

**Gowa - Sulawesi Selatan 92111**

**e-mail : [sungguminasa@pta-makassarkota.go.id](mailto:sungguminasa@pta-makassarkota.go.id)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sungguminasa adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gowa, 30 Juni 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Sungguminasa. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

DRS. MUHAMMAD AMIN, MA.  
NIP.196907162003121003

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran .....	1
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	15
II. Neraca .....	17
III. Laporan Operasional .....	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	23
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	25
A. Penjelasan Umum .....	25
A.1. Dasar Hukum.....	25
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungguminasa .....	26
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi .....	27
A.5. Dasar Pengukuran .....	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah .....	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	39
C.1. Aset Lancar.....	39
C.2. Aset Tetap .....	41
C.5. Kewajiban Jangka Pendek .....	46
C.6. Ekuitas .....	46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	47
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	47
D.2. Beban Pegawai .....	47

D.3.	Beban Persediaan .....	48
D.4.	Beban Barang dan Jasa .....	48
D.5.	Beban Pemeliharaan .....	49
D.6.	Beban Perjalanan Dinas .....	50
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat .....	50
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi .....	51
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih .....	52
D.11.	Beban Lain-lain.....	53
D.12.	Kegiatan Non Operasional .....	53
D.13.	Pos Luar Biasa .....	54
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
E.1.	Ekuitas Awal .....	54
E.2.	Surplus (defisit) LO .....	54
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset .....	55
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan .....	55
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap .....	55
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi .....	55
E.3. 5	Koreksi Lain-lain .....	56
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	57
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar .....	57
E.3.	Ekuitas Akhir.....	57
F.	Pengungkapan Penting Lainnya .....	57
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca .....	57
F.2.	Pengungkapan Lain-lain .....	58
	Laporan-laporan Pendukung.....	60
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	61
	Daftar Hibah Langsung.....	64

# *DAFTAR TABEL*



# Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018 .....	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2019.....	35
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPNP per 30 Juni TA 2019 dan 2018 .....	35
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 .....	36
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 .....	36
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 .....	37
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018.....	38
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018.....	39
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran .....	39
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	40
Tabel 14 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018 .....	40
Tabel 15 Rincian Aset Tetap.....	41
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah .....	42
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap .....	44
Tabel 18 Rincian Aset tak Berwujud .....	45
Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 .....	46
Tabel 20 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017.....	62
Tabel 21 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa .....	65
Tabel 22 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	66

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*



## PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jalan Masjid Agung No. 25 Sungguminasa Gowa - Sulawesi Selatan 92111  
Telp. 0411-864298 Fax. 0411-864298 e-mail : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gowa, 30 Juni 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,

DRS. MUHAMMAD AMIN, MA.  
NIP.196907162003121003

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa Semester I Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2019 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.983.499.001 atau mencapai 47,82 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.239.311.000

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2019 dan 30 Juni TA 2018 dapat disajikan sebagai berikut.

**Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I TA 2019 dan Semester I TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019			30 Juni TA 2018
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	0	0,00	0
Belanja Negara	6.239.311.000	2.983.499.001	47,82	2.560.887.556

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 21.527.677.302, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 33.237.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 21.495.440.302; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 30.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 30.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 21.497.677.302, sehingga jumlah Ekuitas dan Kewajiban sebesar Rp. 21.527.677.302.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2019 dan 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2019 dan 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	30 Juni 2019	TA 2018	Rp	%
<b>Aset</b>				
Aset Lancar	32.237.000	577.675	31.659.325	5.480,47
Aset Tetap	21.495.440.302	21.662.405.798	(126.965.496)	(0,58)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>21.527.677.302</b>	<b>21.622.983.473</b>	<b>(95.306.171)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>Kewajiban</b>				
Kewajiban Jangka Pendek	30.000.000	31.124.626	(7.124.626)	(19,19)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>30.000.000</b>	<b>31.124.626</b>	<b>(7.124.626)</b>	<b>(19,19)</b>
Jumlah Ekuitas Dana	21.497.677.302	21.585.858.847	(88.181.545)	(0,40)
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana</b>	<b>21.527.677.302</b>	<b>21.622.983.473</b>	<b>(95.306.171)</b>	<b>(0,44)</b>

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.071.623.946 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 3.071.623.946) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar (Rp. 56.600) dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar (Rp. 3.071.680.546).

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 21.585.858.847 dikurangi deficit LO sebesar (Rp. 3.071.680.546) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.983.499.001 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 21.497.677.302.

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2019, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	Semester I TA 2019			Smt I TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	0	0,00	139
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>139</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.275.928.000	2.519.279.233	47,75	2.092.429.206
2.	Belanja Barang	B.2.2.	860.383.000	413.219.768	48,03	416.558.350
3.	Belanja Modal	B.2.3.	103.000.000	51.000.000	49,51	51.900.000
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>6.239.311.000</b>	<b>2.983.499.001</b>	<b>47,82</b>	<b>2.560.887.556</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni TA 2019	TA 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	30.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	2.237.000	577.675
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>32.237.000</b>	<b>577.675</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C.2. 1.	13.777.652.000	13.777.652.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.147.116.805	2.122.116.805
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	7.832.677.000	7.806.677.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	35.607.800	35.607.800
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.297.613.303)	(2.119.647.807)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>21.495.440.302</b>	<b>21.662.405.798</b>
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	6.000.000	6.000.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	365.010	365.010
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(6.365.010)	(6.365.010)
<b>Jumlah Aset</b>		<b>21.527.677.302</b>	<b>21.662.983.473</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	37.124.626
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	30.000.000	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	25.000.000	37.124.626
Jumlah Kewajiban	25.000.000	37.124.626

**EKUITAS**

Ekuitas Dana Lancar

C.6

Jumlah Ekuitas Dana	21.497.677.302	21.585.858.847
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	21.527.677.302	21.622.983.473

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

### PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA LAPORAN OPERASIONAL PER 30 JUNI 2019 DAN 2018 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	TA 2018
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	2.491.307.233	2.069.366.076
Beban Persediaan	D. 3	20.889.775	31.054.950
Beban Barang dan Jasa	D. 4	203.560.668	181.567.012
Beban Pemeliharaan	D. 5	159.882.774	172.283.312
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	18.018.000	19.102.200
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	177.965.496	187.434.019
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>3.071.623.946</b>	<b>2.660.807.569</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>			
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(56.600)	3.935.384
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(56.600)</b>	<b>3.935.384</b>

## Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.071.680.546)	(2.656.872.185)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	30 Juni 2018
Ekuitas Awal	E. 1	21.585.858.847	21.901.402.648
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.071.680.546)	(2.656.872.185)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.983.499.001	2.560.887.417
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	(88.181.545)	(95.984.768)
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>21.497.677.302</b>	<b>21.805.417.880</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagian Akun Standar;
- j. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan

yang berada di bawahnya.

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sungguminasa

VISI Pengadilan Agama Sungguminasa adalah “TERWUJUDNYA LEMBAGA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA YANG AGUNG, perwujudan sebuah lembaga dapat memberikan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan dengan wujud transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Untuk mewujudkan VISI tersebut Pengadilan Agama Sungguminasa melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai MISI Pengadilan Agama Sungguminasa antara lain:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
2. Memberikan pelayanan hukum bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
4. Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis Teknologi Informasi

## A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi

mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### (3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### (5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

#### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar



nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan</li> <li>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN</li> </ol>	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
  - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
  - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapa  
tan  
Negara  
dan  
Hibah :  
Rp. 0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan			0	0,00

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	139	(139)	(100)
Total Pendapatan		0	139	(139)	(100)

## B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
2.983.49  
9.001

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni TA 2019 adalah sebesar Rp. 2.983.499.001 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 47,82 persen dari anggaran senilai Rp. 6.239.311.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.275.928.000	2.519.279.233	47,75
Belanja Barang	860.383.000	413.219.768	48,03
Belanja Modal	103.000.000	51.000.000	49,51
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>6.239.311.000</b>	<b>2.983.499.001</b>	<b>47,82</b>
Pengembalian Belanja		0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>6.239.311.000</b>	<b>2.983.499.001</b>	<b>47,82</b>

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2,519,279,233	2,092,429,206	426.850.027	20,39
Belanja Barang	413,219,768	416,558,350	(3.338.581)	(0,80)
Belanja Modal	51.000.000	51.900.000	(900.000)	(1,73)
<b>Total Belanja</b>	<b>2,983,499,001</b>	<b>2,560,887,556</b>	<b>422.611.445</b>	<b>16,50</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai  
: Rp  
2.519.27  
9.233

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 2.519,279,233 dan Rp. 2.092.429.206.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 7 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1,080,215,800	955,679,100	124.536.700	13,03
Beban Pembulatan Gaji PNS	16,944	13,268	3.316	24,99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	64,896,290	60,819,950	4.076.340	6,70
Beban Tunj. Anak PNS	24,036,270	22,776,694	1.259.576	5,53
Beban Tunj. Struktural PNS	18,200,000	18,200,000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	930,650,000	691,910,000	238.740.000	34,50
Beban Tunj. PPh PNS	123,251,844	85,733,835	37.518.009	43,76
Beban Tunj. Beras PNS	44,972,820	45,045,240	(72.420)	(0,16)
Beban Uang Makan PNS	134,795,000	136,648,000	(1.853.000)	(1,35)
Beban Tunjangan Umum PNS	2,775,000	2,590,000	185.000	7,14
Beban Tunjangan Kemahalan	67,500,000	49,950,000	17.550.000	35,13
Hakim				
Beban Uang Lembur	0	0	-	0
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.519.276.498</b>	<b>2.092.429.198</b>	<b>429.847.300</b>	<b>20,39</b>
Pengembalian Belanja	(2,735)	(11)	(2.724)	24,76
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2,519,279,233</b>	<b>2,092,429,206</b>	<b>426.850.027</b>	<b>20,39</b>

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang :  
Rp.  
413,219,  
768

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 413,219,768 dan Rp. 416,558,350.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	102,531,237	99,597,500	2.933.737	2,94
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	54,400	25,700	28.700	111,67



Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,000,000	20,750,000	(2.750.000)	(13,25)
Belanja Barang Operasional Lainnya	30,328,300	22,540,000	7.788.300	34,55
Belanja Langganan Listrik	48,986,680	33,118,288	15.868.392	47,91
Belanja Langganan Telepon	190,051	240,024	(49.973)	(20,82)
Belanja Langganan Air	1,420,000	1,045,000	375.000	35,88
Belanja Sewa	2,050,000	0	2.050.000	100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110,486,000	122,117,000	(11.631.000)	(9,52)
Belanja Peralatan dan Mesin	40,719,974	41,662,972	(942.998)	(2,26)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,018,000	19,102,200	(1.084.200)	(5,67)
Belanja Persediaan	29.566.575	39.558.290	(9.991.715)	(25,25)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>413,219,768</b>	<b>416,558,350</b>	<b>(3.338.582)</b>	<b>(0,80)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>413,219,768</b>	<b>416,558,350</b>	<b>(3.338.582)</b>	<b>(0,80)</b>

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi  
Belanja  
Modal  
:Rp.  
51.000.0  
00

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 51.000.000 dan Rp. 51.900.000.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Jun TA 2019	30 Jun TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	25.000.000	51.900.000	(26.900.000)	(51,83)
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	26.000.000	0	26.000.000	100
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>51.000.000</b>	<b>51.900.000</b>	<b>(900.000)</b>	<b>(1,73)</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>51.000.000</b>	<b>51.900.000</b>	<b>(900.000)</b>	<b>(1,73)</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp  
32,237,000

### C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 32,237,000 dan Rp. 577,675.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 10 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	TA 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	2.237.000	577.675
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>32.237.000</b>	<b>577.675</b>

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 30.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 11 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	TA 2018
1.	Kas di Bendahara Bengeluaran	30.000.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>

### C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp.0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Tabel 12 Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	TA 2018
1.	Belanja Dibayar di Muka	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### C.1.3. Persediaan

*Persediaan:  
Rp.2.237.000*

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.237.000 dan Rp. 577.675. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018**

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	987.000	577.675
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	1.250.000	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0

7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
<b>Total</b>		<b>2.237.000</b>	<b>577.675</b>

## C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp. 21,495,440,302* Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp. 21,495,440,302 dan Rp. 21,622,405,798 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 14 Rincian Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Jun TA 2019	TA 2018	Perubahan
1	Tanah	13.777.652.000	13.777.652.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.147.116.805	2.122.116.805	25.000.000
3	Gedung dan Bangunan	7.832.677.000	7.806.677.000	26.000.000
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	35.607.800	35.607.800	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>23.793.053.605</b>	<b>23.742.053.605</b>	<b>51.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan		(2.297.613.303)	(2.119.647.807)	(177.965.496)
Nilai Buku Aset Tetap		21.495.440.302	21.622.405.798	(126.965.496)

### C.2.1. Tanah

*Tanah: Rp. 13.777.652.000* Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 13.777.652.000 dan Rp. 13.777.652.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	868	137	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas Jabatan	3.158.652.000
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.500	163	Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI	Bangunan Kantor	10.619.000.000
Jumlah						13.777.652.000

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
2,147,116,805*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,147,116,805 dan Rp. 2,122,116,805.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	2.122.116.805
<b>Mutasi Tambah</b>	
Pembelian	25.000.000
<b>Mutasi Kurang</b>	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2019	2.147.116.805
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(1.925.400.761)
Nilai Buku 30 Juni 2019	221.716.044

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
7,832,677,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 7,832,677,000 dan Rp. 7,806,677,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	7.806.677.000
<b>Mutasi Tambah</b>	

Pembelian (Penambahan Nilai Gedung)	26.000.000
Mutasi Kurang	
Penyitaan Pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2019	7.832.677.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(372.212.542)
Nilai Buku 30 Juni 2019	7.460.464.458

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku 30 Juni 2019	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya: Rp  
35.607.800*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 35.607.800 dan Rp. 35.607.800.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	35.607.800
----------------------------	------------

<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
<b>Saldo per 30 Juni 2019</b>	<b>35.507.800</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
<b>Nilai Buku 30 Juni 2019</b>	<b>35.507.800</b>

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp. 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. (2,297,613,303)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. (2,297,613,303) dan Rp. (2,119,647,807).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

**Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.147.116.805	(1.925.400.761)	221.716.044
2	Gedung dan Bangunan	7.832.677.000	(372.212.542)	7.460.464.458
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	35.607.800	0	35.607.800

Jumlah	10.015.401.605	(2.297.613.303)	7.717.788.302
--------	----------------	-----------------	---------------

#### C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :  
Rp 6.000.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.000.000 dan Rp. 6.000.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 17 Rincian Aset tak Berwujud**  
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2018	6.000.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	6.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(6.000.000)
Nilai Buku 30 Juni 2019	0

#### C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 365.010*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 365.010 dan Rp. 365.010. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Sungguminasa serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	365.010
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2019	365.010
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(365.010)
Saldo per 30 Juni 2019	0



## C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban  
Jangka Pendek :  
Rp. 30.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Sungguminasa per 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah :

**Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2019 dan 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	TA 2018
Uang Muka dari KPPN	30.000.000	0
<b>Jumlah</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>

### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 30.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

## C.6. Ekuitas

*Ekuitas:  
Rp  
21.497.677.302*

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.497.677.302 dan Rp. 21.805.417.880. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2019 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 7.803.223 atau (8,12) persen dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang

berakhir tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 30.000.000 , sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 37.124.626.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan  
PNbp : Rp. 0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
4.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
5.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
6.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan			0	0,00

### D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
: Rp  
2.491.307.233*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.491.307.233 dan Rp. 2.069.366.076. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
--------	-----------------	-----------------	-------------	---

Beban Gaji Pokok PNS	1,080,215,800	955,679,100	124.536.700	13,03
Beban Pembulatan Gaji PNS	16,944	13,268	3.316	24,99
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	64,896,290	60,819,950	4.076.340	6,70
Beban Tunj. Anak PNS	24,036,270	22,776,694	1.259.576	5,53
Beban Tunj. Struktural PNS	18,200,000	18,200,000	0	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	930,650,000	691,910,000	238.740.000	34,50
Beban Tunj. PPh PNS	123,251,844	85,733,835	37.518.009	43,76
Beban Tunj. Beras PNS	44,972,820	45,045,240	(72.420)	(0,16)
Beban Uang Makan PNS	134,795,000	136,648,000	(1.853.000)	(1,35)
Beban Tunjangan Umum PNS	2,775,000	2,590,000	185.000	7,14
Beban Tunjangan Kemahalan	67,500,000	49,950,000	17.550.000	35,13
<b>Hakim</b>				
Beban Uang Lembur	0	0	-	0
Pengembalian Beban	(2,735)	(11)	(2.724)	24,76
<b>Pembulatan Gaji PNS</b>				
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2,519,279,233</b>	<b>2,092,429,206</b>	<b>426.850.027</b>	<b>20,39</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan : Rp 20.889.775*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.889.775 dan Rp. 31.054.950. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	20.889.775	31.054.950	(10.165.175)	(32,73)
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>20.889.775</b>	<b>31.054.950</b>	<b>(10.165.175)</b>	<b>(32,73)</b>

### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa : Rp 203.560.668*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp. 203.560.668 dan Rp. 181.567.012 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Keperluan Perkantoran	102,531,237	99,597,500	2.933.737	2,94
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	54,400	25,700	28.700	111,67
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	18,000,000	20,750,000	(2.750.000)	(13,25)
Belanja Barang Operasional Lainnya	30,328,300	22,540,000	7.788.300	34,55
Beban Bahan	0	4.250.500	(4.250.500)	(100)
Belanja Langganan Listrik	48,986,680	33,118,288	15.868.392	47,91
Belanja Langganan Telepon	190,051	240,024	(49.973)	(20,82)
Belanja Langganan Air	1,420,000	1,045,000	375.000	35,88
Belanja Sewa	2,050,000	0	2.050.000	100
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>203.560.668</b>	<b>181.567.012</b>	<b>21.993.656</b>	<b>12,11</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:*  
Rp. 159.882.774

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 159.882.774 dan Rp. 172.283.312 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	110.486.000	122.117.000	(11.631.000)	(9,52)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.719.974	41.662.972	(942.998)	(2,26)
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	8.676.800	8.503.340	173.460	2,03

Total Beban Pemeliharaan	159.882.774	172.283.312	(12.400.538)	(7,19)
--------------------------	-------------	-------------	--------------	--------

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan  
Dinas :  
Rp.18.018.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 18.018.000 dan Rp. 19.102.200. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
<b>Beban Perjalanan Biasa</b>	<b>18.018.000</b>	<b>19.102.200</b>	<b>(1.084.200)</b>	<b>(5,67)</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas dalam Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>18.018.000</b>	<b>19.102.200</b>	<b>(1.084.200)</b>	<b>(5,67)</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
<b>Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beban Peralatan dan Mesin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
<b>Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan Sosial : Rp.0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
<b>Total Beban Bantuan Sosial</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 177.965.496*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 177.965.496 dan Rp. 187.434.019. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	84.665.525	94.463.162	(9.797.637)	(10,37)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	93.299.971	92.970.857	329.114	0,35
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>177.965.496</b>	<b>187.434.019</b>	<b>(9.468.523)</b>	<b>(5,05)</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>177.965.496</b>	<b>187.434.019</b>	<b>(9.468.523)</b>	<b>(5,05)</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0

Panjang				
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

## D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain  
: Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan  
Non  
Operasional :  
Rp. (56.600)

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019	30 Juni TA 2018	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non	0	0	0	0,00
Lancar				
Penjualan Alat Angkut	0	0	0	0,00
Darat				
Defisit Penjualan Aset Non	0	0	0	0,00
Lancar				



Penjualan Alat Kantor	0	0	0	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	139	(139)	(100)
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	55.300	4.245.870	(4.190.570)	(98.70)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	111.900	310.625	(198.725)	(63,97)
<b>Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional</b>	<b>(56.600)</b>	<b>3.935.384</b>	<b>(3.991.984)</b>	<b>(101,40)</b>

### D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.585.858.847 dan Rp. 21.901.402.648

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. (3.071.680.546) dan Rp. (2.656.872.185) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar

biasa.

### E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 Dan Rp.0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

### E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.983.499.001 dan Rp. 2.560.887.417

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	0
Ditagikan ke Entitas Lain	2.983.499.001
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>2.560.887.417</b>

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 2.983.499.001

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, sebesar Rp.0 dari total Rp.0 yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	-	Uang	
2	-	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

### E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 21.497.677.302 dan Rp. 21.805.417.880

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

NIHIL

## F.2. Pengungkapan Lain-lain

NIHIL

### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

NIHIL

### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

NIHIL

### F.2.3. Rekening Pemerintah

No	Nomor Rek	Atas Nama	Nama Bank	Jenis Rek	Tujuan Pembukaan	Izin Pembukaan
1.	022501000243305	BPG PA SUNGGUMINASA (307491)	PT. BRI (PERSERO) CAB. SUNGGUMINASA	GIRO	PENAMPUNG DIPA BUA	KPPN NO. S- 976/WPB.24/K P.0230/2015 TGL. 06/04/2015
2.	022501001171307	BPG PA SUNGGUMINASA (309075)	PT. BRI (PERSERO) CAB. SUNGGUMINASA	GIRO	PENAMPUNG DIPA BADILAG	KPPN NO. S- 1175/WPB.24/ KP.0230/2015 TGL. 04/05/2015
3.	7777000785	RPL 136 PDT PA SUNGGUMINASA UTK BIAYA PERKARA	BANK SYARIAH MANDIRI KCP. GOWA	GIRO	PENAMPUNGAN DANA TITIPAN	S-1773/ WPB.25/ KP.0204/ 2018 TGL. 18-09-2018

### F.2.4. Revisi DIPA

No.	Tgl. Revisi	Jenis Revisi	Revisi Ke-
1.	29 Maret 2019	Revisi Halaman III DIPA (Penyesuaian Rencana Penarikan Triwulan I dan Ralat karena Kesalahan Administrasi/	01

		Perubahan Pejabat Penandatanganan SPM dari Sdr. Bulgis Yusuf, S.HI., M.H. ke Verry Setya Widyatama, S.Kom)	
2.	26 Juni 2019	Revisi DJA oleh Unit Eselon I terhadap DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa (307491) terkait penambahan alokasi anggaran yang tercatat pada halaman IV DIPA dengan rincian :  1. Akun 521111 – Belanja Keperluan Perkantoran – Langganan Internet (BA BUN) sebesar Rp. 72.800.000,-  2. Akun 532111 – Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Laptop SIPP Hakim 1 Unit (BA BUN) sebesar Rp. 13.000.000,-	03

#### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

NIHIL

#### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

NIHIL

# LAPORAN PENDUKUNG

---

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*



Pengadilan Agama Sungguminasa

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap  
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d Periode Ini	Beban Penyusutan Periode Ini	Akumulasi Penyusutan Periode Ini	Total Akumulasi Penyusutan s.d Periode Ini	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>							
	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	418,544,117	418,544,117	0	0	418,544,117	0
	Alat Kantor	5	238,340,091	165,480,091	12,360,000	0	177,840,091	60.500.000
	Alat Rumah Tangga	5	751,717,886	628,894,236	22,630,106	0	651,524,342	100,193,544
	Alat Komunikasi	5	18,648,343	18,648,343	0	0	18,648,343	0
	Alat Kedokteran	5	0	0	0	0		0
	Unit Alat Laboratorium	8	0	0	0	0		0
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15	0	0	0	0		0
	Komputer Unit	4	575,925,765	484,361,251	37,302,014	447.684.231	0	521,663,265
	Peralatan Komputer	4	163,432,800	144,299,395	12,373,405	0	156,672,800	6,760,000
	Alat Kerja Penerbangan	10	0	0	0	0		0
	Peralatan Olah Raga	3	567.608	567.608	0	0	567.608	0
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>							

Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6,607,664,000	234,634,992	78,540,778	0	313,175,770	6,294,488,230
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.225.013.000	44,277,579	14,759,193	0	59,036,772	1,165,976,228
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
D. Aset Tetap Lainnya							
Bahan Perpustakaan Tercetak	-	0	0	0	0		0
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan							
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	0	0	0	0		0
Alat Kantor	5	0	0	0	0		0
Alat Rumah Tangga	5	365.010	365.010	0	0	365.010	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		10,000,218,620	2,140,072,622	177,965,496	0	2,318,038,118	7,682,180,502
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		10,000,218,620	2,140,072,622	177,965,496	0	2,318,038,118	7,682,180,502



**Pengadilan Agama Sungguminasa**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2019**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	<b>NIHIL</b>						
	Jumlah :						

***Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.***

***Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)***



Catatan atas  
Laporan Keuangan

005

01

1900

307491

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}